Ahmad Sarwat, Lc.,MA

NEGARA ISLAM

Dilemma & Pro Kontra

بسم الله الرحمن الرحیم

Daftar Isi

Pendahuuan

Mendirikan negara Islam adalah cita-cita yang penuh dengan dilemma dan pro kontra di tengah perdebatan umat Islam dewasa ini.

Sejak tumbangnya Bani Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924 lalu, muncul banyak ide sampai gerakan yang punya tujuan akhir untuk mendirikan negara Islam.

Di awali oleh Jamaluddin Al-Afghani dengan ide besarnya : Pan Islamisme. Lalu muncul di Mesir gerakan yang didirikan oleh Hasan Al-Banna , Al-Ikhwan Al-Muslimun di tahun 1918. Al-Maudidi di Pakistan juga turut ikut memberikan gagasan-gagasan tentang negara Islam. Di Jordan ada An-Nabhani yang mendirikan Hizbut Tahrir dengan cita-cita ingin mendirikan khilafah.

Di Indonesia, tercatat ada pemberontakan Karto Suwiryo dengan cita-cita pendirian Darul Islam , atau yang familiar di sebut dengan NII.

Di masa modern ini, muncul ISIS di Irak dan Syam, yang rajin mengekspor ide dan gagasan mendirikan negara Islam.

Dilemma

Dilemma yang muncul adalah bahwa para penggagas berdirinya negara Islam ini seperti jalan sendirian, tidak bersama-sama dengan seluruh umat Islam. Malahan yang lebih dilematis lagi, ternyata

jumlah yang menggagas ini tidak hanya satu pihak, ada banyak pihak. Tetapi dilematisnya justru mereka tidak saling bekerja sama atau menguatkan, justru kesan yang kita dapat justru satu sama lain merasa sebagai lawan, musuh atau saingan.

Sebutlah misalnya ketika ISIS memproklamasikan negara yang mereka klaim sebagai negara Islam. Ternyata jaringan HTI tidak mengakuinya. Sebaliknya, ISIS pun juga tidak mengakui HTI.

Kalau sesama penggagas ide negara Islam saja sudah tidak akur dan saling menjatuhkan, apa lagi dengan jutaan kelompok umat Islam lain, yang boleh jadi gagasannya sama sekali tidak sama.

Jadi sejak tahun 1924 ide dan gagasan mendirikan negara Islam sudah ada, tetapi jatuh bangun silih berganti, tidak saling mendukung bahkan umumnya tidak mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat dunia Islam. Setidaknya jumlah umat Islam di dunia hari ini ada 1,5 hingga 1,6 milyar. Tetapi yang menyatakan bersedia untuk ikut gerakan mendirikan negara Islam nampaknya tidak terlalu signifikan.

Disitulah kita menyebut bahwa ide dan gagasan mendirikan negara Islam semantara ini masih dilematis, dalam arti belum mendapat dukungan umat Islam dalam jumlah yang berarti. Mungkin kalau segelintir anak-anak muda yang bersemangat ingin meruntuhkan negaranya sendiri lalu ingin mendirikan negara Islam, ada juga sih satu dua.

Akan tetapi jumlahnya tidak signifikan bahkan cenderung terabaikan. Sebab belum apa-apa,

sesama mereka pun sudah tidak akur, tidak sehati dan tidak setia.

Pro Kontra

Disebut pro kontra karena secara kajian ilmiyah, bentuk negara Islam itu sendiri belum ada rumusan baku yang disepakati para ulama.

Malah sepanjang penelitian sejarah kenabian dan para shahabat, bentuk negara yang mereka selenggarakan nampak terus mengalami perubahan dan dinamika yang terus berubah-ubah.

Misalnya, dalam hal pola pergantian kepemimpinan. Saat Rasulullah SAW wafat dan digantikan Abu Bakar, polanya adalah penujukan langsung oleh Nabi sendiri. Meski pesannya agak tersamar, namun pada akhirnya semua sepakat membaiat Abu Bakar, dengan alasan Rasulullah SAW selalu memintanya mengimami shalat kala Beliau sakit. Ini dianggap oleh para shahabat saat itu semacam isyarat kuat dari Baginda Nabi SAW atas penunjukan Abu Bakar sebagai pengganti Beliau SAW.

Ketika Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar, prosesnya beda lagi. Dan ketika Umat wafat digantikan oleh Utsman, ternyata format penetapannya berubah lagi. Dan perubahan pola suksesi ini terus berlangsung sampai masa Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai amirulmukminin.

Jadi agak kesulitan juga para ulama dalam menyimpulkan pola suksesi pergantian kepemimpinan yang manakah yang mewakili Islam, salah satunya saja atau kesemuanya bisa dimasukkan

ke dalam kriteria keislaman juga.

Apalagi kalau kita menjabarkan sturktur kepemimpinan negara di masing-masing masa para khalifah yang empat itu, nampak jelas semuanya perbeda, seperti ada semacam proses perubahan yang terus menerus dan tidak statis.

Maka semakin berbedalah para ulama dalam merumuskan konsep negara Islam. Perbedaan ini sudah terjadi sejak masa kenabian yang kemudian terus ke masa empat khalifah yang rasyidah. Dan ketika masuk ke masa-masa berikutnya, maka sistem kenegaraan yang berlaku menjadi semakin sarat perbedaan, dengan dinamika yang tidak pernah berhenti.

Maka semakin kuatlah perbedaan para ulama dalam mendefinisikan negara Islam. Itulah yang Penulis maksud dengan pro kontra.

Buku ini hanyalah sebuah catatan kecil saja, dimana Penulis ingin mengingatkan bahwa ketika para ulama berbeda pendapat dalam urusan ibadah ritual seperti shalat, zakat, puasa dan haji, maka perbedaan pendapat di bidang negara dan pemerintahan pun lebih dahsyat lagi perbedaannya.

Namun tetap saja semua masuk ke dalam rumah besar Islam, meski berbeda pandangan tentang konsep negara. Maka yang sudah disepakati sejak awal bahwa meski pandangan umat Islam tidak sama tentang negara, tapi tidak ada satu pun yang sampai dianggap telah keluar dari agama Islam. Sebab konsep negara adalah wilayah fiqih yang sifatnya ijtihadi, bukan wilayah aqidah yang membatasi

agama seorang, apakah dia dianggap muslim atau kafir.

Semoga buku ini bisa memberi tambahan wawasan keilmuan dan bisa dijadikan salah satu rujukan dalam memahami ilmu fiqih, khususnya di bidang negara dan pemerintahan.

Amin ya rabbal alamin.

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Bab 1 : Pro Kontra Pendirian Negara Islam

Kalau berbicara tentang negara Islam, secara umum kita akan mendapatkan dua kelompok besar dari umat Islam, yaitu kelompok yang mendukung tegaknya negara Islam, dan kelompok yang menentangnya.

Sebenarnya pembagian menjadi dua kelompok ini hanya sekedar penyederhanaan belaka. Dalam prakteknya, masing-masing kelompok pun saling berbeda pandangan tentang detail apa yang mereka dukung. Dan perdebatan ini sudah terjadi jauh sebelum kita merdeka hingga hari ini.

A. Perbedaan Pendapat

Yang menarik untuk diperhatikan, meski kedua kelompok ini saling berbeda pendapat, tetapi semuanya menyatakan diri tetap beragama Islam. Sehingga perbedaan pendapat ini terjadi bukan antara umat Islam dengan non-muslim, tetapi justru terjadi antara sesama pemeluk agama Islam sendiri.

1. Kelompok Yang Mendukung

Sebagian dari umat Islam ada yang dengan semangat mendukung ditegakkannya negara Islam. Meski pun dalam hal langkah dan tata cara untuk mendirikannya, mereka pun seringkali berbeda pendapat.

Ada yang melalui cara memisahkan diri dan membentuk kekuatan baru, untuk suatu ketika merobohkan negara yang sudah ada, lewat kudeta

atau lewat cara-cara lainnya. Tetapi ada juga yang mengupayakannya lewat cara-cara yang lebih kompromistis, tetapi arah perjuangannya tetap menuju tegaknya negara Islam.

2. Kelompok Yang Menentang

Sementara buat kelompok yang menentang negara Islam, umumnya setiap mendengar istilah negara Islam, mereka akan segera antipati dan bereaksi negatif, bahkan terkadang sampai kepada sikap apriori.

Seringkali mereka akan membayangkan bahwa negara Islam itu identik negara teokrasi ala Eropa zaman abad pertengahan. Ciri negara teokrasi dalam pandangan mereka lantas sulit dihindarkan dari kesan sebagai negara dengan pemerintahan tangan besi yang kejam, sadis, otoriter, menindas kebebasan dan hak asasi manusia, dan serba berdarah-darah.

Kekuasaan bukan terletak pada rakyat tetapi di tangan segelintir orang yang mengatas-namakan tuhan, namun tangannya kotor bersimbah darah, melakukan kekejaman demi kekejaman yang memilukan hati.

B. Argumentasi Kelompok Penentang

Kelompok yang menentang berdirinya negara Islam, mendasarkan pemikiran dan pandangan mereka dari beberapa hal, antara lain :

1. Tidak Ada Nash Yang Mewajibkan

Kalangan yang anti dengan negara Islam berargumen bahwa bahwa tidak ada satu pun nash

baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam.

Bahkan kata ‘daulah’ dalam arti negara di dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan. Hal itu berarti menurut mereka, Al-Quran tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk membangun negara Islam. Dan demikian juga dengan hadits nabi sebagai sumber rujukan kedua dalam agama Islam, juga tidak pernah memerintahkan berdirinya negara Islam.

Sehingga menurut mereka, keinginan untuk mendirikan negara Islam dianggap mengada-ada, menggunakan penafsiran yang dipaksakan, yang sesungguhnya tidak pernah diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadits.

Sehingga kesimpulannya menurut kelompok ini, keinginan sebagian kalangan untuk mendirikan negara Islam dianggap punya latar belakang kepentingan di luar dari urusan agama.

2. Keberadaan Agama Lain

Kalangan yang anti dengan berdirinya negara Islam juga berargumen bahwa mendirikan negara Islam berarti tidak menghormati keberadaan agama lain. Padahal kita umumnya tinggal di negeri yang bukan hanya berpenduduk muslim saja. Sebaliknya, kebanyakan manusia walau pun berbeda agama, tetapi tinggal di suatu negeri yang satu.

Menurut mereka, mendirikan negara Islam sama saja kita mengekang kebebasan beragama, serta

tidak melihat kepada realitas yang sesungguhnya.

Dan kalau sampai umat Islam yang mayoritas bersikeras untuk mendirikan negara berdasarkan agama mereka, maka mereka yang beragama lain atau non-muslim akan menjadi kalangan minoritas yang tertindas, hak-hak mereka akan dikebiri, jati diri mereka akan diinjak-injak dan eksistensi mereka dianggap tidak ada.

Kalau demikian yang terjadi, maka di negara lain pun akan terjadi hal yang sama.Kalangan non-muslim akan mendirikan negara berdasarkan agama mereka, dan umat Islam yang minoritas itu juga akan ditindas.

Karena itu, bagi kelompok ini, ide untuk mendirikan negara Islam atau negara berdasarkan agama dianggap sebagai ide yang tidak produktif, liar dan tidak manusiawi.

3. Madinah Bukan Negara Islam

Kelompok yang anti dengan negara Islam juga seringkali berargumen dengan apa yang mereka anggap sebagai kenyataan bahwa Madinah di masa Rasulullah SAW bukan negara Islam.

Dalam pandangan mereka, dasar-dasar masyarakat Madinah adalah pluralisme atau keberagaman. Umat Islam dan umat-umat yang lain, yaitu agama yahudi, nasrani dan juga agama orang-orang Arab asli bersepakat untuk membangun sebuah tatanan masyarakat bersama, menjadi apa yang mereka sebut sebagai Piagam Madinah.

Dalam pandangan kelompok ini, Piagam Madinah bukan representasi dari sebuah negara Islam.

Madinah bukan negara yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi berdasarkan kesepakatan antar umat beragama.

Maka ide untuk mendirikan negara Islam di masa sekarang ini dianggap tidak punya dasar oleh kelompok ini.

4. Kegagalan Semua Usaha Membentuk Negara Islam

Argumentasi yang paling sulit untuk bisa dijawab dari kelompok ini adalah kenyataan bahwa semua usaha di masa sekarang ini untuk mendirikan negara Islam tidak pernah sukses. Semua usaha itu, baik di tengah bangsa Indonesia, atau pun di negeri yang lain, dinilai telah gagal total menurut mereka.

Berbagai pemberontakan DI/TII baik yang dimotori oleh Sekar Madji Kartosoewiryo di Jawa Barat, Ibnu Hajar di Kalimantan, Kahar Muzakar di Sulawesi, Tengku Daud Beureuh di Aceh, semua kandas dan tidak pernah terlaksana.

Menurut mereka yang kegagalan di skala yang lebih luas juga terjadi. Misalnya Republik Islam Pakistan yang awal berdirinya bertujuan untuk mendirikan negara Islam, ternyata hingga hari telah mengalami kegagalan secara total. Alih-alih menjadi negara Islam, yang terjadi saat ini Pakistan malah menjadi sarang terorisme yang amat subur. Setiap hari negeri itu diguncang bom, pembunuhan, bahkan pembantaian. Padahal ketika belum memisahkan diri dari India, kehidupan mereka jauh lebih baik.

5. Kegagalan Saudi Arabia

Menurut kelompok ini, satu-satunya negara Islam di dunia ini hanya Saudi Arabia. Namun menurut mereka, Saudi Arabia tidak sepenuhnya merupakan negara Islam.

Pertama, karena negara ini merupakan kerajaan, dimana kekuasaan berada di tangan raja secara garis keluarga. Jadi Saudi Arabia dianggap bukan sebagai negara, tetapi lebih kepada sebuah dinasti keluarga yang kaya raya dan menjalankan pemerintahannya secara otoriter.

Kedua, karena negara ini juga masih belum sepenuhnya menghormati hak asasi manusia. Buktinya para tenaga kerja wanita masih banyak yang diperbudak, diperkosa bahkan dibunuh hingga pulang hanya tinggal nyawa.

Kalau Indonesia mau dijadikan negara Islam, maka menurut kalangan yang tidak setuju, justru akan mengalami *set-back* ke belakang, mundur beberapa abad ke zaman purba.

6. Tegaknya Syariah Tidak Harus Berbentuk Negara

Argumentasi tidak harusnya ada negara Islam pada bagian ini menyatakan bahwa yang wajib dijalankan adalah hukum syariah breupa hudud yang merupakan ketetapan dari langit. Maka apabila di suatu negara yang tidak menegaskan dirinya negara Islam, namun 100% menjamin bisa dijalankannya hukum Islam, cukuplah sudah tidak perlu lagi mendirikan negara Islam.

Hal ini terjadi di beberapa negara seperti

Indonesia, Malaysia, Pakistan dan beberapa negara lainnya. Secara keseluruhan, negara itu tidak secara 100% menyatakan diri sebagai daulah Islamiyah atau pun khilafah Islamiyah. Juga tidak secara 100% menerapkan syariat Islam dalam hukum positifnya.

Namun negara itu memberikan keluasan dan otoritas pada wilayah tertentu untuk menjalankan syariat Islam secara hukum posistif. Misalnya Daerah Istimewa (DI) Aceh Darussalam sebagai sebuah provinsi yang otonom memberlakukan syariat Islam. Secara hukum, DI Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun dalam implementasi hukum syariah, ternyata mereka resmi menganut hukum jinayat sebagaimana yang diajarkan dalam ilmu fiqih jinayat, seperti potong tangan pencuri, merajam pezina atau mencambuknya 100 kali, mencambuk penuduh zina 80 kali, atau menghukum pelaku hirabah dengan disalib, dipotong kaki dan tangan secara bersilangan, atau menjatuhinya dengan hukuman mati.

Maka ketika semua hukum Islam bisa berjalan di suatu negeri atau di suatu wilayah otonom, tidak lagi diperlukan secara formal sebuah negara yang dengan resmi menyebut dirinya sebagai daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah. Toh, tujuan utamanya sudah dicapai, yaitu terlaksananya hudud dari Allah SWT secara resmi dan formal.

C. Argumentasi Kelompok Pendukung

Adapun argumentasi kelompok yang mendukung tegaknya negara Islam antara lain :

1. Perintah Al-Quran dan Hadits

Kalangan yang anti dengan negara Islam berargumentasi bahwa di dalam Al-Quran dan hadits tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam. Maka kalangan yang mendukung berdirinya negara Islam menjawab bahwa memang benar bahwa tidak ada ayat yang bunyinya : “dirikanlah negara Islam”, namun bukan berarti Al-Quran tidak mewajibkan umat Islam untuk mendirikannya. Kalau logikanya hanya begitu, maka banyak sekali hal-hal yang tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran dan Hadits, tetapi wajib bagi kita untuk mengerjakannya.

Bukankah di dalam Al-Quran dan Hadits tidak ada perintah untuk mendirikan sekolah dan universitas? Lalu apakah umat Islam tidak perlu mendirikan sekolah dan universitas?

Bukankah di dalam Al-Quran dan Hadits tidak ada perintah untuk mendirikan rumah sakit dan klinik? Apakah umat Islam tidak wajib mendirikannya?

Bukankah di dalam Al-Quran dan Hadits tidak ada perintah untuk mendirikan pabrik dan industri? Lalu apakah umat Islam tidak perlu mendirikannya?

Bahkan dari 6000-an ayat lebih, tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan masjid. Yang ada hanya pernyataan bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman dan sebagainya. Tetapi perintah untuk mendirikan masjidnya sendiri malah tidak ada. Lantas apakah umat Islam tidak perlu mendirikan masjid?

Al-Quran memerintahkan umat Islam punya negara dan pemerintahan sendiri, bukan membonceng menjadi warga kelas dua di sebuah negara yang tidak menjalankan hukum Allah. Dalil dari Al-Quran tentang wajib adanya pemerintahan Islam antara lain :

a. Kewajiban Taat Kepada Pemerintahan Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul dan ulil amri di antara kamu.. (QS. An-Nisa' : 59)

Dalam ayat ini Allah SWT menyebut ulul-amri di antara kalian. Pesan yang bisa didapat dari ayat ini adalah bahwa umat Islam harus taat pemerintah yang dari kalangan mereka sendiri. Semua hanya bisa diwujudkan dengan adanya pemerintahan negara Islam, dan bukan pemerintahan di luar Islam.

b. Kewajiban Berhukum Kepada Pemerintah Islam

Allah SWT telah mewajibkan umat Islam untuk berhukum dengan kepada pemerintah Islam. Dan hal itu tidak mungkin terwujud manakala umat Islam tidak punya negara sendiri.

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ

يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, merekatidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa' : 65)

c. Kewajiban Menggunakan Hukum Allah

Meski tidak ada nash yang secara langsung memerintahkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam, tetapi Allah SWT mewajibkan umat Islam untuk menggunakan hukum yang Allah turunkan, dan bukan hukum yang dibuat oleh manusia (*hukum wadh'i*).

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. (QS. Al-Maidah : 49)

Tidak menggunakan hukum yang Allah turunkan bahwa disebut sebagai kafir, zalim dan fasik.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah : 44)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah : 45)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah : 47)

Sulit bagi orang yang waras dan mengerti logika untuk menampik wajibnya mendirikan negara Islam. Sebab semua hukum yang Allah SWT telah turunkan itu mustahil dijalankan bila tidak ada negara Islam.

Mana mungkin para pemimpinnegara Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Perancis, Jerman atau Itali mau menjalankan hukum yang Allah turunkan? Tentu umat Islam harus punya negara sendiri, yang dengan itu hukum Islam bisa dijamin terlaksana dan tegak terus. Sebab yang bisa menjamin terlaksananya hukum Allah hanya umat Islam.

2. Keberadaan Agama Lain

Menurut mereka yang menentang berdirinya negara Islam, kalau Islam dijadikan negara, maka hal itu sama saja dengan menjajah, menzalimi dan menekan agama lain di luar agama Islam.

Sedangkan bagi mereka yang mendukung berdirinya negara Islam, keberadaan pemeluk agama lain justru tidak menjadi masalah, sebab negara Islam

yang dimaksud bukan negara teokrasi, dimana satu agama memegang kekuasaan lalu menjadi penguasa dan menindas pemeluk agama lain, dengan mengatas-namakan nama negara dan kekuasaan.

Negara teokrasi ala Eropa di abad pertengahan tentu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan masa kejayaan Islam.Madinah di masa Rasulullah SAW justru memberikan hak yang sepenuhnya kepada non-muslim untuk tetap eksis.

Pemerintah Mesir di masa Amr bin Al-Ash jelas berbeda dengan Herzog Raja Inggris. Amr bin Al-Ash diancam dengan keras oleh Khalifah Umar ketika berniat mau meluaskan masjid dengan menggusur tanah milik seorang non muslim yang merasa dizalimi. Tetapi Herzog di Inggris memang telah membantai berjuta rakyatnya, hanya lantaran sebagiannya berbeda mazhab dengan dirinya. Sebagian dari mereka diampuni, sehingga hukumannya dikurangi, seharusnya mati dibakar, menjadi mati dengan pedang saja.

Suatu ketika Ali bin Abi Thalib sang khalifah menemukan baju besinya yang hilang berada di tangan seorang non muslim. Namun orang yang membawa baju besinya itu mengaku dia adalah pemiliknya karena telah membelinya dengan sah. Keduanya sepakat membawa masalah ini kepada qadhi setempat. Sang Qadhi tentu bagian dari pemerintahan negara Islam, posisinya dalam hirarki pemerintahan tentu jauh di bawah jabatan Ali bin Abi Thalib sang Khalifah. NamunQadhi itu malah mengalahkan Ali dalam kasus ini dan memenangkan

pihak non muslim. Alasannya karena Ali tidak bisa memberikan bukti atas kepemilikannya, dan saksi yang diajukan tidak bisa diterima pengadilan, karena masih keluarganya.

Bandingkan dengan yang dilakukan Ratu Isabella yang berkuasa di Spanyol. Berjuta-juta kaum muslimin yang tadinya berkuasa, lantas dikalahkannya dan wanita ini naik tahta kerajaan Khatolik itu untuk sekedar membantai umat Islam. Hari ini boleh dibilang sudah tidak ada lagi seorang muslim pun yang tersisa. Isabella hanya memberi umat Islam satu dari tiga pilihan, masuk Kristen, diusir pergi dari negeri itu atau dibunuh. Dan ternyata yang paling banyak adalah mereka yang dibunuh.

Negara Islam yang dimaksud tentu jauh berbeda dengan Kerajaan Khatolik Spanyol yang tangannya berlumur darah. Dan menyamakan antara negara Islam dengan kesadisan raja Eropa adalah sikap yang jelas-jelas menunjukkan kekurang-cerdasan.

Sebab selama 14 abad negara Islam berdiri, belum pernah ada satu pun nyawa kafir zimmi yang dibolehkan untuk dibunuh, kecuali bila mereka sendiri yang menjadi pengkhianat dan sejak awal sudah setuju bila berkhianat akan dihukum.

3. Fakta Sejarah

Mereka yang mendukung berdirinya negara Islam berargumen bahwa negara Islam bukan ilusi melainkan fakta sejarah. Dan agak sulit bagi kita untuk memungkiri fakta sejarah yang justru umat

non-muslim malah mengakui keberadaannya.

Sejak pertama kali hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW sudah mendirikan negara Islam. Dan pemerintahan beliau SAW berlangsung selama 10 tahun hingga beliau meninggal dunia.

Sepeninggal beliau, Abu Bakar menjadi khalifah (pengganti) beliau, bukan dalam kapasitas seorang nabi tentunya, melainkan dalam kapasitas sebagai kepala negara. Masa kepemimpinan Abu Bakar cukup singkat, hanya dua tahun saja, namun sangat berarti dalam sejarah Islam.Kemudian beliau digantikan oleh Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib ridhwanullahi ‘alaihim. Sehingga para ahli sejarah menyebutkan bahwa total masa khilafah rasyidah ini berusia 30-an tahun.

Setelah itu negara Islam terus berpindah pusat pemerintahannya ke Damaskus, kali ini diteruskan oleh Bani Umayah, kurang lebih selama 90 tahunan.

Berikutnya berpindah lagi ke Baghdad di bawah pemerintahan Bani Abasiyah, kurang lebih selama 400 sampai 500-an tahun.

Lalu pindah lagi pusatnya ke Istambul, Turki, di bawah kepemimpinan Bani Ustmaniyah. Usia khilafah ini mencapai lima abad, yaitu sejak abad ke-15 hingga abad ke-20. Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di tahun 1453 dan kesultanan Turki Utsmani berakhir tahun 1924.

Semua itu sulit dipungkiri sebagai fakta nyata atas keberadaan negara Islam, yang terbentang sepanjang 14 abad lamanya tanpa terputus. Dan

negara Islam itu meliputi 3 benua besar, yang ujung baratnya ada di Maroko dan ujung timurnya sampai di Marauke.

Menurut pendukung negara Islam, mereka yang anti dengan negara Islam itulah yang hidup di dalam ilusi dan tidak melek sejarah.

4. Kebutuhan Syariah

Kalangan yang mendukung berdirinya negara Islam berargumen bahwa keberadaan negara Islam merupakan hajat atau kebutuhan syariat Islam itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa syariat Islam itu bukan hanya sekedar potong tangan, hukum rajam, atau hukum cambuk belaka. Tetapi syariat Islam juga mencakup masalah shalat, zakat, puasa, haji, pernikahan dan lainnya.

Dan kalau ditelusuri lebih jauh, ternyata walau sekedar shalat, zakat, puasa, haji dan menikah, namun keberadaan negara Islam dan pemerintahnya tetap dibutuhkan. Tanpa keberadaan negara Islam, semua itu sulit ditegakkan dengan sempurna.

Syariat Islam mewajibkan negara dan pemerintahannya untuk menghukum orang yang tidak mau mengerjakan shalat, baik karena dia mengingkari kewajibannya atau pun karena malas. Kalau tidak ada negara Islam, lalu siapa yang mengerjakan kewajiban itu?

Syariat Islam mewajibkan umat Islam untuk memakmurkan masjid, termasuk dalam hal pembiayaannya, mengangkat imamnya, dan seterusnya. Kalau tidak ada negara Islam, lalu siapa

yang mengerjakan tugas itu?

Syariat Islam mewajibkan negara untuk memungut zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada fakir miskin dan asnaf lain yang berhak. Dan kalau ada orang kaya yang membandel tidak mau bayar zakat, wajib dihukum, mulai dari disita hartanya, sampai kepada vonis kafir dan diperangi. Kalau tidak ada negara Islam, siapakah yang mengerjakan kewajiban itu?

Syariat Islam mewajibkan umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Namun seringkali terjadi masing-masing orang punya hitung-hitungan tentang jatuhnya awal Ramadhan yang berbeda-beda, termasuk juga jatuhnya tanggal 1 Syawwal. Kepada siapakah umat ini harus merujukkan masalahnya kalau bukan kepada negara Islam? Negara dan pemerintah Islam adalah pihak yang paling berwenang dan berkompeten untuk menengahi perbedaan pandangan dalam masalah ini.

Syariah Islam mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tentu prakteknya harus ada pihak yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelancaran ibadah haji ini. Kalau bukan negara Islam, lantas siapa yang berkewajiban untuk mengerjakan semua ini?

Syariah Islam mewajibkan pernikahan itu harus ada wali dari pihak perempuan. Terkadang ada wanita yang tidak punya wali, karena dia hidup sebatang kara, atau mungkin dia wanita satu-satunya di dalam keluarganya yang beragama Islam. Lalu

siapa yang menjadi wali atas wanita itu bila dia tidak punya wali? Jawabnya wali dari wanita itu adalah pemerintah yang sah, dalam hal ini pemerintah dari negara Islam. Itulah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau :

أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil, nikahnya itu batil dan nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)

D. Titik Temu

Sesungguhnya kalau masing-masing pihak berpikir positif, bersikap profesional, menjauhkan diri dari sikap aprori dan pandai menempatkan sesutu sesuai dengan posisinya yang tepat, tentu akan ada titik temu dari kedua pendapat itu.

Sayangnya, seringkali kedua pendapat itu diwakili oleh mereka yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok, serta lebih mementingkan gengsi dalam berdiskusi.

Akibatnya, jarang sekali terjadi titik temu yang dapat menyatukan berbagai pendapat. Kalau di meja diskusi saja sudah tidak bisa bertemu, alangkah sulitnya kalau di tengah lapangan akan terjadi kerjasama.

Justru yang terjadi malah sangat menyedihkan, yaitu sesama umat Islam saling tuduh dan saling menghina, bahkan mencemooh saudaranya. Yang satu menuduh saudaranya sebagai kafir atau setidaknya sekuler, sedangkan yang lain menuduh saudaranya sebagai ektrimis dan teroris.

Bab 2 : Adakah Negara Islam Hari Ini?

Setelah kita membahas kilasan sejarah perjalanan negara Islam (khilafah Islamiyah) yang terbentang selama kurang lebih 14 abad, yang menjadi sebuah pertanyaan menggelitik sekarang, adakah negara Islam hari ini?

Kalau Khilafah Islamiyah jelas sudah berakhir sejak diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Ataturk di tahun 1924. Dan sejak itu mata rantai panjang negara Islam terputus sudah, yang diawali di masa Rasulullah SAW ketika beliau membuat Piagam Madinah di tahun 624 Masehi.

Untuk menjawab pertanyaan para ilmiwan dan ulama banyak berbeda pendapat, sebagian menyebutkan negara Islam masih ada, hanya wujudnya saja yang berbeda. Namun sebagian lainnya tegas menyebutkan bahwa negara Islam sudah tidak ada lagi. Perbedaan mereka berangkat dari perbedaan dalam menetapkan batasan yang dimaksud dengan negara Islam.

Sebagian negara di dunia ini ada yang secara tegas menamakan diri sebagai negara Islam. Sebagian lainnya tidak menamakan negaranya dengan nama Islam, tetapi secara tegas memberlakukan hukum Islam, ada yang nyaris hampir 100% menjalankan semua hukum tetapi ada yang menjalankan sepotong-sepotong. Dan sebagian yang lain hanya menyebutkan bahwa dasar negara mereka adalah Islam.

Dan yang paling banyak ada negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, dipimpin oleh penguasa yang juga beragama Islam, serta memberikan kebebasan untuk menjalan beberapa wajah dari syariat Islam seperti shalat berjamaah, menutup aurat, dan beragam bentuk implementasi syariah seperti *al-ahwal asy-syakhshiyah*.

A. Negara Resmi Bernama Islam

Memang banyak negara di dunia ini yang secara formal telah mengklaim diri sebagai negara Islam, baik kata ‘Islam’ itu dijadikan bagian dari nama resmi negara itu, atau pun hanya disebutkan sebagai hukum yang resmi berlaku.

1. Republik Islam Pakistan

Negara lain yang secara resmi menyebut diri sebagai negara Islam adalah Pakistan. Nama resmi negara hasil pecahan dari India yang merdeka pada tahun 1947 itu adalah Republik Islam Pakistan atau Islāmī Jumhūrī-ye Pākistān (اسلامی جمہوریۂ پاکستان).
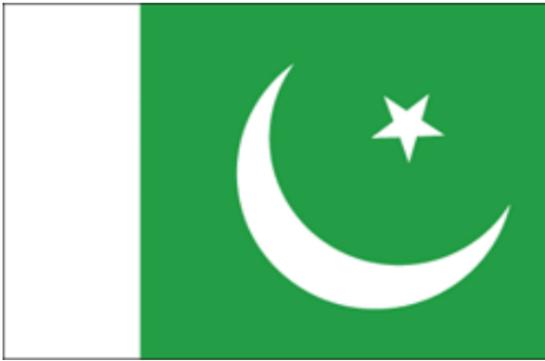
Berdirinya Republik Islam Pakistan tidak lepas dari peran seorang pengacara muslim Muhammad Ali Jinnah. Pada awalnya, berdirinya Pakistan merupakan problem tersendiri, terutama dalam mencari alasan atau *raison d’etre* Pakistan merdeka.

Apakah *the founding fathers* Pakistan bermaksud mendirikan Negara Islam atau tengah berupaya membangun tanah air bagi orang Islam? Lebih dari itu, apakah kekhawatiran sebagai warga minoritas di India yang mayoritas Hindu dapat dijadikan alasan berdirinya Pakistan merdeka.

Berbagai teori telah dimunculkan tentang alasan-alasan pokok berdirinya Pakistan sebagai sebuah negara dengan identitas Islam.

Namun sayangnya para penguasa Pakistan tidak kompak dalam mengelola negara itu, sebagian ingin menerapkan hukum Islam, namun sebagian lagi ingin mengawinkan hukum Islam dengan hukum sekuler.

Sekulerisasi Pakistan amat terasa di masa pemerintahan Partai Rakyat Pakistan yang dipimpin oleh Zulfikar Ali Bhutto (1971-1977). Ali Bhutto datang membawa tawaran baru, yaitu mengawinkan Islam dengan Sosialisme.

Ali Bhutto kemudian dijatuhkan lewat kudeta militer di bawah pimpinan Jenderal Zia ul-Haq Juli 1977 dengan alasan tingkah lakunya yang tidak Islami dan keakrabannya dengan isu demokrasi kebarat-baratan, kemudian ia digantung dengan tuduhan terlibat konspirasi untuk membunuh ayah politisi Ahmed Reza Kasuri.

Ziaul-Haq mengembalikan aturan pakaian tradisional Muslim dan memberlakukan kembali hukuman yang Islami dan hukum komersial.

Dalam hal politik luar negeri, Zia ul-Haq memberi dukungan penuh kepada Mujahidin Afghanistan yang

berjuang melawan invasi militer Uni Soviet (1979-1989).

Kekuatan sekuler diam-diam rupanya kembali menyusun kekuatan. Tiba-tiba pada 1988, pesawat helikopter yang ditumpangi Zia ul-Haq bersama Duta Besar Amerika Serikat di Pakistan meledak.

Sejak wafatnya dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1988, politik Pakistan didominasi ketegangan etnik, permusuhan, dan skandal-skandal korupsi di antara anggota kelas-kelas elit dan para ahli agama Islam tidak lagi berpengaruh. Islam masih menjadi identitas Pakistan dan ada pada semua kehidupan masyarakat, tetapi tetap tidak berpengaruh pada kehidupan.

Pasca Ziaul Haq, sepertinya program Islamisasi tidak begitu populer lagi di Pakistan. Pakistan tidak lebih seperti negara-negara berkembang lainya yang penuh dengan intrik politik, perdebatan panjang antara Islam dan demokrasi dan yang tak kalah beratnya, internasionalisasi Pakistan, terutama soal nuklir dan terorisme. Tidak heran Pakistan belakangan menjadi barometer keamanan bagi negara muslim di kawasan lainnya, termasuk Asia Tenggara.

Sekilas pemerintahan setelah Zia ul Haq, muncul Benazir Bhutto, putri mendiang Zulfikar Ali Butho, yang menjadi perdana menteri wanita pertama di Republik Islam Pakistan. Terpilihnya Benazir Bhuto merupakan kejutan bagi umat Islam dan juga bagi banyak negara non muslim.

Pemimpin perempuan merupakan suatu yang masih diperdebatkan terutama di Pakistan yang pada Era Zia ul-Haq diharamkan. Benazir Bhuto telah menjadi zaman peralihan dari era perdebatan mengenai identitas Islam kepada wacana hubungan Islam dan demokrasi (termasuk masalah gender), sekaligus menjadi tanda bagi kemenangan demokrasi atas rezim militer.

Pada 1990 Benazir digulingkan oleh Presiden Ghulam Ishaq Khan dan lagi-lagi didukung oleh militer karena dituduh korupsi namun ia tidak pernah diadili. Tahun 1993 ia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri hingga 1996. Pada tahun 1996, Presiden Farooq Leghari menaggalkan jabatan Benazir atas tuduhan skandal korupsi.

Benazir digantikan Nawaz Sharif, seorang pengikut setia Zia ul-Haq. Sharif menjadi PM setelah Partai Liga Muslimin Pakistan yang dipimpinnya menang pemilu dan mempunyai kursi mayoritas di parlemen. Dalam perjalanan pemerintahannya, Sharif bersitegang dengan militer yang kemudian dikudeta oleh Musharraf yang saat itu duduk dalam struktur Dewan Keamanan Nasional.

Beberapa pemimpin senior militer lalu mendukung Musharraf dalam kudeta damai terhadap Sharif. Kepemimpinan Musharraf pun tetap bertahan setelah didukung dengan partai-partai di Pakistan. Yang menarik justru pada tahun 2006, Nawaz Sharif memutuskan berkoalisi dengan Benazir Bhutto, rival lamanya, dalam Aliansi untuk Pemulihan Demokrasi, demi menggulingkan Musharraf.

Kepemimpinan Musharraf tidak luput dari konflik. Bentrokan berdarah di sejumlah wilayah Pakistan awal Maret 2007 merupakan klimaks dari krisis politik yang menimpa Presiden Pervez Musharraf. Dia memecat Ketua Mahkamah Agung Iftikhar Muhammad Chaudhry karena dituduh menyalahgunakan kekuasaan.

Pihak oposisi menuduh pemecatan itu dilatarbelakangi kekhawatiran Musharraf kalau Chaudhry akan menghalangi niatnya menjadi presiden untuk ketiga kali. Chaudhry juga dikhawatirkan mengubah konstitusi untuk melucuti posisi rangkap Musharraf sebagai panglima angkatan bersenjata. Pemecatan Chaudhry memicu protes luas dari para pengacara dan partai-partai oposisi di seluruh negeri, walau aksi mendukung Musharraf pun dilakukan partai propemerintah Mutahida Qami Movement (MQM). Bentrokan pun tidak terhindarkan.

Kelompok oposisi, baik dari kubu mantan PM Benazir Bhutto yakni Partai Rakyat Pakistan dan kelompok pendukung mantan PM Nawaz Sharif banyak yang menjadi korban akibat bentrokan itu.

Terakhir sebagai kesudahan karir politik Benazir Bhutto, 27 Desember 2007 ia terbunuh oleh serangan tembakan dan bom bunuh diri di Rawalpindi sesaat setelah ia berkampanye untuk posisi PM yang ke tiga kalinya.

Era Perves Musharraf (1999) adalah bukti terkini tentang betapa rumitnya mengurus sebuah negara modern yang diberi nama Republik Islam Pakistan

itu. Dalam konstitusinya tercantum dasar filosofi mewah tentang kedaulatan Allah atas alam semesta dan syariah sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam realitas, baik gagasan kedaulatan Allah maupun syariah ternyata tidak mampu menolong nasib Pakistan berhadapan dengan konflik suku yang beragam dan sengketa politik yang sering berkuah darah itu.

2. Republik Islam Afghanistan

Afghanistan pernah diserbu oleh pasukan komunis Unisofyet pada tahun 1979-1989.

Namun setelah itu Uni Sovyet mengalami perpeca-han dan kemunduran di dalam negeri, yang menga-kibatkan seluruh pasukan-nya ditarik keluar dari Afghanistan.

Sepeninggal Uni Sovyet, bangsa Afghanistan memproklamirkan diri dan menyatakan kemerdekaan mereka, serta menamai negara mereka dengan nama resmi Republik Islam Afghanistan, De Afġānistān Islāmī Jomhoriyat (دولت اسلامی افغانستان).

3. Brunai Darussalam

Negara Brunei Darussalam adalah salah satu negara tetangga kita. Meski tidak mencantumkan

kata ‘Islam” sebagai nama resmi, namun kata ‘*darussalam*’ di dalam istilah fiqih tidak lain bermakna negara Islam, sebagai lawan dari istilah *darul-kufri* (negara kafir).

Yang menjadi pertanyaan, apakah sebuah negara sudah bisa dianggap sebagai negara Islam, hanya dengan menambahkan embel-embel kata Islam di dalam nama resmi negara itu?

4. Republik Islam Iran

Iran resmimenambah-kan kata ‘Islam’ di dalam nama resmi negara itu. Dalam bahasa Inggris, nama negara itu adalah Islamic Republic of Iran. Dan dalam bahasa Arab disebut جمهوری اسلامی ایران, atau dalam bahasa Persia dinamakanJomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān.

Penamaan ini sebenarnya baru saja dilakukan tepatnya pada tahun 1979. Ketika Syah Reza Pahlevi digulingkan oleh sebuah Revolusi dipimpin Khomeini setelah kembali dari pembuangan di Perancis pada 1 Februari 1979. Khomeini kemudian membentuk pemerintahan sementara, pada 11 Februari yang dikepalai Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri.

Setelah itu, Khomeini mengadakan pungutan suara untuk membentuk sebuah Republik Islam. Keputusan undian menunjukkan lebih dari 98% rakyat Iran setuju dengan pembentukan itu.

Sistem pemerintahan baru yang dibentuk

berasaskan undang-undang Islam, sayangnya hanya diterapkan sebagian. Maka Khomaini kemudian menamakan Republik Islam Iran sebagai sebuah negara teokratis.

Dalam perkembangannya kemudian, negara ini lebih merupakan negara aliran mazhab Syiah ketimbang sebuah negara Islam. Dan bahkan kemudian malah mengekspor doktrin-doktrin aliran mazhab Syiah ke berbagai negara yang lain.

B. Negara Menyatakan Berlakunya Hukum Islam

Selain yang menamakan secara resmi negara mereka dengan kata ‘Islam’ atau sejenisnya, ada juga negara yang mengakui Islam sebagai hukum yang resmi berlaku di negera mereka. Di antaranya adalah Kerajaan Saudi Arabia dan Malaysia.

1. Kerajaan Saudi Arabia

Contoh yang sederhana adalah Kerajaan Saudi Arabia. Bentuk negara ini adalah monarki mutlak Islam, hukum-hukum yang berlaku adalah hukum Islam.

Bahkan negara ini memberlakukan hukum jinayat dalam arti sesungguhnya, seperti merajam pezina, memotong tangan pencuri, mencambuk peminum khamar dan juga menjalankan hukum qishash dalam urusan pembunuhan atau melukai orang lain.

Tidak sedikit tenaga kerja Indonesia yang sudah dihukum di negara ini, hingga hukuman mati. Bahkan yang sedang menanti masa hukuman mati pun tidak sedikit.

Konon semua hukuman mati itu adalah bentuk penerapan syariat Islam di negara tersebut.

2. Malaysia

Banyak disebutkan bahwa pada sebagian hukumnya Malaysia telah menjalankan hukum Islam. Namun penerapannya masih terbatas, baik yang menyangkut persoalan perdata dan ada yang menyangkut persoalan pidana.

Dalam bidang perdata meliputi [1] Pertunangan, nikah cerai, membatalkan nikah atau perceraian. [2] Memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta akibat perkara di atas. [3]Nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan dan pemeliharaan anak. [4] Pemberian harta wakaf. [5] Perkara lain yang diberikan kuasa berdasarkan undang-undang.

Dalam persoalan pidana mengatur hal sebagai berikut: [1] Penganiayaan terhadap istri dan tidak patuh terhadap suami. [2]Melakukan hubungan seks yang tidak normal. [3] Penyalah-gunaan minuman keras. [4] Kesalahan terhadap anak angkat. [5]Kesalahan-kesalahan lain yang telah diatur lebih jauh dalam undang-undang.

Walaupun beberapa masalah telah diatur dalam hukum Islam di Malaysia, namun hukum Inggris tetap diberlakukan pada sebagian besar legislasi dan

yudisprudensi. UU Hukum Perdata 1956 menyebutkan bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, Pengadilan Perdata harusmengikuti hukum adat Inggris atau aturan lain yang sesuai. Dengan demikian hukum Islam hanya berlaku pada wilayah yang terbatas, yaitu yang berhubungan dengan keluarga dan pelanggaran agama.

Dalam hukum keluarga, pengadilan perdata tetap memiliki yuridiksi, seperti dalam kasus hak milik, warisan, serta pemeliharaan anak. Bila terdapat pertentangan antara pengadilan perdata dan syari'ah, maka kewenagan peradilan perdata lebih diutamakan.

Melihat kenyataan tersebut di atas, eksistensi hukum Islam di Malaysia sesungguhnya belum berlaku secara menyeluruh terhadap semua penduduk negara tersebut. Hal ini karena masih adanya pengaruh hukum koloni Inggris yang pernah menjajah Malaysia.Negara tetangga kita diam-diam secara resmi mencantumkan Islam sebagai hukum resmi yang berlaku.

3. Berasesori Islam

1. Somalia

Sementara Republik Somalia di Afrika punya motto negara yang unik, yaitu *Laa Ilaah Illallah Muhammad Rasulullah*. Ini bukan moto ormas atau pengajian, melainkan moto sebuah negara secara resmi yang nyaris hampir semua penduduknya muslim.

2. Libya

Sedangkan Libya yang asalnya bagian dari khilafah Turki Utsmani, lalu dicaplok oleh tentara Italia dan kemudian memerdekakan diri, punya lagu kebangsaan resmi dengan judul : *Allahu Akbar*.

3. Indonesia

Dan para founding father negara Indonesia di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, menyebutkan bahwa kemerdekaan negara Indonesia adalah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan atas berkat Yesus Kristus, Sang Budha Gautama atau Sang Hyang Widhi.

Dan Piagam Jakarta pun menjadi saksi bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluknya.

Meski pun tujuh kata pada sila pertama dari Piagam Jakarta ini kemudian dihapus atas ultimatum kalangan non muslim di wilayah bagian timur, namun upaya mengalahnya para faounding father pada 18 Agustus 1945 lebih karena menjaga keutuhan integritas bangsa yang nyaris terkoyak.

Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah : apakah sebuah negara bisa disebut sebagai negara Islam, hanya dengan mencantumkan hal-hal yang berbau keislaman, baik dalam moto, lagu kebangsaan atau pun juga dalam pembukaan UUD-nya?

4. Berpenduduk Mayoritas Muslim

Namun kalau definisi negara Islam itu kita

perlonggar menjadi negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, atau negara dengan pemimpin beragama Islam, atau negara yang menjalankan syiar-syiar keislaman, seperti adanya shalat berjamaah, berkumandangnya adzan, tentu kita akan dengan mudah untuk menyebutkannya.

The Pew Forum on Religion & Public Life, sebuah lembaga riset dan survei terkemuka Amerika Serikat yang nonpartisan dan nonadvokasi , merilis laporan penelitiannya tentang *Mapping the Global Muslim Populatian : A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population*. Laporan ini merupakan sebuah studi demografis yang komprehensif dari 232 negara dan wilayah(*territory*) selama tiga tahun.

Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah 1,57 milyar penduduk Muslim di dunia saat ini, merepresentasikan 23% dari penduduk dunia yang pada 2009 diperkirakan berjumlah sekitar 6,8 milyar. Dengan demikian, sekarang ini hampir satu dari setiap empat penduduk dunia beragama Islam atau hampir seperempat penduduk dunia adalah Muslim.

Laporan ini berdasarkan penelitian yang melibatkan konsultan sekitar 50 demografer dan ahli sosial dari universitas dan pusat riset seluruh dunia. Para peneliti Pew Forum ini mengumpulkan dan menganalisis sekitar 1.500 sumber dan data kependudukan.

Populasi Muslim saat ini, 60% lebih hidup di benua Asia, dan sekitar 20% di Timur Tengah dan Afrika Utara. Tapi, Timur Tengah dan kawasan Afrika Utara

memiliki pesentase tertinggi dari negara-negara mayoritas penduduknya Muslim. Setengahnya lebih dari 20 negara dan wilayah di kawasan ini memiliki populasi sekitar 95% atau lebih penduduknya Muslim.

Dua pertiga umat Muslim dunia tinggal di 10 negara. Dari kesepuluh negara ini, enam di Asia (Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh, Iran, dan Turki), tiga di Afrika Utara (Mesir, Algeria, dan Maroko) dan satu negara di Sub-Sahara Afrika (Nigeria).

1. Indonesia

Dari semua itu, Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, menurut estimasi berjumlah 202.867.000 jiwa, 88,2% dari seluruh penduduk negeri ini, atau 12,9% dari populasi Muslim dunia. Itu berarti dari seluruh umat Islam di permukaan planet bumi, 1/8 dari mereka adalah bangsa Indonesia.

Seluruh penduduk di negeri Arab sana, seandainya memutuskan untuk melebur negara mereka menjadi satu negara, belum tentu jumlah penduduknya akan menyamai penduduk muslim di Indonesia.

Kita sebagai rakyat Indonesia pasti bangga kalau disebut sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Logikanya, Indonesia seharusnya menjadi representasi dari umat Islam sedunia.

Tetapi Angka ini bisa menjadi buah simalakama. Kita tentu miris kalau mendengar bahwa angka penduduk muslim yang sedemikian besar itu rata-

rata adalah penduduk miskin dan tidak berpendidikan, angka kesehatan yang jauh di bawah standar, dimana mereka hidup di bawah pemerintahan yang korup dan memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

2. Pakistan

Yang berada di urutan kedua adalah Republik Islam Pakistan. Negeri yang tidak pernah sepi dari peperangan dan terorisme ini berpenduduk 96,3% muslim, yaitu 174.082.000 jiwa, atau 11,1% dari populasi muslim dunia.

Pakistan sesungguhnya merupakan bagian dari India, lalu umat Islam disana memisahkan diri dan mendirikan sebuah negara sendiri, khusus untuk orang-orang India yang beragama Islam.

3. India

Berada pada urutan ketiga adalah India. Walaupun persentase penduduk muslimnya hanya 13,4 %, tapijumlahnya ketiga terbesar dunia, yaitu 160.945.000 jiwa, atau 10,3% dari jumlah Muslim dunia.

Seandainya muslim India tidak memisahkan diri menjadi negara tersendiri, yaitu Pakistan, seharusnya India dan Pakistan berpenduduk muslim kurang lebih 33 juta jiwa, menjadi penduduk muslim terbesar di dunia.

4. Bangladesh

Sementara itu, Bangladesh berpenduduk

145.312.000 muslim, 89,6% dari keseluruhan penduduknya, atau 9,3% dari populasi Muslim dunia.

5. Mesir

Sedangkan dua negara Afrika menduduki urutan ke lima dan ke enam, yaitu Mesir dan Nigeria. Mesir berpenduduk 94,6% Muslim, yaitu 78.513.000 jiwa, atau 5,0% dari penduduk Muslim dunia.

6. Nigeria

Dan Nigeria, 78.056.000 penduduknya Muslim, yaitu 50,4% atau 5,0% dari keseluruhan Muslim di dunia.

7. Iran

Dua negara Asia lainnya yang penduduk Muslimnya menduduki urutan ke tujuh dan ke delapan, yaitu Iran dan Turki. Iran berpenduduk 99,4% Muslim, yaitu 73.777.000 jiwa, atau 4,7% Muslim dunia.

8. Turki

Sedangkan Turki jumlahnya hampir sama dengan Iran, yaitu 73.619.000 jiwa, hampir 98% dari seluruh penduduknya, dan 4,7% dari penganut Islam dunia.

Jumlah penduduk Muslim terbesar ke-9 dan ke-10 ditempati oleh dua negara Afrika Utara, yaitu Algeria dan Maroko. Algeria berpenduduk 98,0% Muslim atau 2,2% dari seluruh Muslim dunia, yaitu 34.199.000 jiwa. Sedangkan Maroko penduduknya hampir 99% adalah Muslim, yaitu 31.993.000 jiwa, tapi persentase dari populasi Muslim dunia kurang dari 2%.

Bab 3 : Negara Islam dan Indonesia

Apakah Indonesia sudah termasuk negara Islam?

Itu sebuah pernyataan yang menggelitik sekaligus sulit untuk dijawab. Dan tentunya menimbulkan perbedaan pendapat sekaligus perdebatan panjang.

Sebagian kalangan umat Islam ada yang berpikir bahwa bentuk negara Indonesia yang sekarang ini sudah final dan tidak perlu diutak-atik lagi. Pancasila sebagai dasar negara bahkan sempat dijadikan sebagai satu-satunya asas buat semua ormas dan orsospol, khususnya di era Soeharto.

Sebaliknya, kalangan yang pro dengan negara Islam, tetap bercita-cita untuk mendirikan negara Islam, dengan beragam imaginasi yang mereka bayangkan. Yang menarik, seperti apa sosok negara Islam yang terlintas dalam benak mereka, ternyata juga tidak kompak antara satu pendukung dengan pendukung yang lain.

Dalam bab ini insya Allah kita akan membahas secara lebih ilmiyah tentang apa dan bagaimana sosok negara Islam, setidaknya menurut para ulama yang muktamad, mulai dari masa Rasulullah SAW, para khulafaurrasyidin, dan masa-masa berikutnya.

Namun tidak ada salahnya kita akan mulai dari kisah haru biru tentang cita-cita mendirikan negara

Islam di negeri sendiri, baik yang pro mau pun kontra.

A. Negara Islam Sebelum Penjajahan

1. Abad ketujuh

Pada tahun 30 Hijri atau 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Utsman ibn Affan *radhiyallahuanhu* mengirim delegasi ke negeri Cina, untuk memperkenalkan Daulah Islam yang belum lama berdiri.

Dalam perjalanan yang memakan waktu empat tahun ini, para utusan sang Khalifah ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 M, Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera.

Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan, abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah.

Sejak Islam dibawa masuk ke Indonesia di abad ke tujuh itulah, pengamalan syariat Islam tidak bisa dipungkiri telah dijalankan secara individu oleh masyarakat yang sudah memeluk Islam.

Berbeda dengan sejarah versi Belanda yang bersumber dari orientalis Dr. Snouck Hurgronje, Islam masuk Indonesia bukan di abad ketiga-belas. Sayangnya, versi penjajah inilah yang saat ini menjadi kurikulum nasional sejarah yang diajarkan di sekolah

dan perguruan tinggi.

Prof. Dr. HAMKA, ulama kenamaan yang juga seorang sejarawan, meruntuhkan teori usang itu. Dalam seminar tentang awal mula penyebaran agama Islam di nusantara tahun 1972, beliau menegaskan bahwa Islam tidak dibawa oleh pedagang dari Gujarat India, melainkan langsung dibawa oleh para juru dakwah dari Jazirah Arabia.

Namun harus diakui, hingga awal abad ketiga-belas, agama Islam belum menjadi sebuah dasar dari pemerintahan kerajaan. Meski sudah dipeluk oleh mayoritas anak bangsa, khususnya masyarakat pesisir.

Menarik catatan yang dibuat oleh Thomas Arnold dalam *The Preaching of Islam.* Orang barat yang bukan muslim ini mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan pedang, tidak dengan merebut kekuasaan politik. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkannya sebagai *rahmatan lil'alamin*.

2. Kesultanan Islam

Beberapa abad kemudian, periode dakwah Islam di Indonesia telah memasuki masa kerajaan Islam. Mulai dari Kerajaan Samudera Pasai di Aceh di abad XIII hingga Kesultanan Mataram Islam Jogjakarta di abad ini.

Saat itu Islam bukan hanya sekedar agama yang besifat individu, tetapi juga sudah menjadi sebuah

state, dalam format negara dengan memenuhi syarat negara modern, ada pemerintahan, rakyat dan wilayah. Bahkan pelaksanaan hukum hudud seperti potong tangan pencuri, merajam pezina, mencambuk peminum khamar dan seterusnya.

Samudera Pasai adalah kesultanan Islam pertama di Indonesia berdiri abad ke-13. Berita dari Marcopolo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 H / 1292 M, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battuthah, pengembara Muslim dari Maghribi., yang ketika singgah di Aceh tahun 746 H / 1345 M menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi'i.

Di pulau Jawa, para wali songo yang dikenal membawa Islam masuk ke dalam istana. Bahkan pada akhirnya, Islam menjadi agama kerajaan secara sah dan resmi. Demak Bintoro adalah kesultanan yang 100 persen menjadi representasi sebuah negara Islam dalam arti sesungguhnya, dimana syariat Islam dijalankan sampai kepada hukum hudud dan seterusnya.

Keraton Jogjakarta di masa lalu pun juga pernah menjalankan bagian dari hukum hudud sebagaimana ditetapkan dalam syariah islam. Orang yang berzina dirajam atau dicambuk, orang yang mencuri dipotong tangan dan seterusnya.

Artinya, Indonesia atau tepatnya nusantara pada masa itu, baik secara keseluruhan atau secara bergantian pernah merasakan menjadi wilayah dari kesultanan Islam.

Dan semua itu berakhir ketika penjajah bergantian datang ke negeri ini dan menerapkan hukum asing buatan barat. Saat itu, setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu hukum tradisi, hukum Islam dan hukum barat.

B. Masa Kemerdekaan

Wujudnya negara Islam telah melahirkan pro dan kontra sepanjang berdirinya republik ini. Pro kontra ini sudah sejak lama terjadi, dan semakin jelas jejaknya semenjak rekaman peristiwa di tahun 1945, tepatnya 17 dan 18Agustus.

Kala itu, bom Atom dijatuhkan Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. Jepang pun kalah tanpa syarat. Bangsa Indonesia punya kesempatan untuk terlepas dari penjajahan sertamemproklamasikan kemerdekaannya. Tapi muncul dua kepentingan yang mengerucut menjadi dua kubu.

Kubu pertama adalah kubu nasionalis, meski beragama Islam, tetapi mereka tidak ingin Indonesia dijadikan negara Islam dengan berhukum kepada Quran dan Hadits.

Kubu kedua adalah kubu islamis, katakan saja demikian. Mereka ingin Indonesia menjadi sebuah negara Islam secara formal, berlandaskan Quran dan Hadits, dengan menyelenggarakan syariat Islam seperti hukum potong tangan, hukum rajam dan seterusnya.

Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan

golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler dimana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar".

Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/ declaration of independence).

Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa". Rumusan kalimat

> *"... dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."*

Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), diantaranya A. A. Maramis, Mr., menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya" untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara.

Konon untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, diantaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu.

Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sebuah "emergency exit" yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia.

Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dikemukakan dalam rapat pleno PPKI.

Intinya saat itu, kalangan islamis kalah dalam menetapkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang secara formal memberlakukan bahkan mewajibkan pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya.

Sudah kalah kemudian kalangan islamis pun terpecah menjadi dua kubu yang saling berbeda platform.

Sebagian kelompok memilih untuk memisahkan diri dari Indnesia. Namun sebagian lainya mau

menerima kekalahan dengan tetap memperjuangkan Islam dari “dalam”. Mereka tetap ikut dalam pemerintahan, hingga tetap mewarnai jalannya negara ini dengan warna-warna Islam yang kental.

1. Memisahkan Diri

Kubu yang tidak mau menerima kekalahan merasa telah dikhianati oleh lawan politik mereka. Sehingga memilih untuk tidak lagi bersatu dan akhirnya memilih untuk memisahkan diri dari NKRI.

Pada tahun 1947, kalangan ini memproklamasikan sebuah negara baru dengan nama Darul-Islam atau lebih dikenal dengan sebutan Negara Islam Indonesia (NII).

Negara Islam Indonesia diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh pimpinannya Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, dan bertahan hingga 13 tahun lamanya (1949-1962).

Mereka kemudian dianggap telah melakukan pemberontakan terhadap negara Indonesia, setidaknya demikianlah yang ditulis dalam buku sejarah yang diajarkan di sekolah.

Meski kalangan NII sendiri mengklaim bahwa apa yang mereka proklamasikan bukan mendirikan negara di dalam negara. Sebab pada saat NII diproklamasikan, wilayah Indonesia saat itu sedang mengecil, hanya meliputi wilayah yang sempit, karena tekanan pihak Belanda. Di saat wilayah itu menyempit, terjadi kekosongan kekuasaan, maka NII diproklamasikan di wilayah yang bukan kekuasaan pemerintah Indonesia.

2. Berjuang Dari Dalam

Sebagian lagi tetap meneruskan perjuangan Islam lewat ikut masuk ke dalam tubuh pemerintahan. Kira-kira mirip dengan politik SWADESI versi Mahatma Gandhi dari India.

Soekarno sebagai presiden yang juga merasakan bagaimana kalangan islamis dikalahkan dan khawatir kalau pemberontakan kalangan Islam semakin mendapat angin dan semakin hari semakin kuat. Akhirnya kepada umat Islam yang masih setia dengan negara, dia memberi semacam kompensasi. Kekalahan umat Islam yang pahit itu kemudian ‘dibayar’ dengan menghadiahi meeka sebuah Departemen (saat itu istilahnya Kementerian) yang khusus menangani masalah-masalah umat Islam, yaitu Kementerian Agama.

Kementerian yang merupakan pembayaran kompensasi ini boleh dibilang unik dan satu-satunya, karena sangat berbeda dengan lainnya. Ibarat sebuah negara dalam negara. Betapa tidak, di dalam Kementerian ini ada berbagai macam bidang seperti layaknya sebuah negara. Kementerian ini mengurusi mulai dari masalah pendidikan sampai urusan hukum.

Di bidang pendidikan, Kementerian ini mengurusi berbagai macam pendidikan agama, mulai dari Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtiyaidah, Tsanawiyah, Aliyah hingga Institul Agama Islam Negeri.

Di bidang hukum, Kementerian ini punya Pengadilan Agama di tingkat Kabupaten hingga ke

tingkat pusat. Dimana pengadilan ini mengurus masalah nikah, talak, rujuk, bagi waris, waqaf dan seterusnya.

Kementerian ini juga mengurus masalah dokumen perjalanan haji, sehingga bisa mengeluarkan pasport sendiri, yang seharusnya menjadi wewenang Departemen Hukum.

Dengan kata lain, kementerian ini memang awalnya dijadikan sebagai hadiah besar atas kebesaran hati umat Islam yang rela melepas hak mereka untuk punya negara Islam sendiri. Sampai kalangan nasionalis mencurigainya sebagai representasi dari negara Islam secara terselubung.

Kalangan nasionalis khawatir wujudnya Kementerian ini merupakan konsesi yang terlalu besar dari Republik yang baru berdiri kepada kaum muslimin. Mereka khawatir, bahwa Kementerian akan didominasi pejabat-pejabat Muslim dan, dengan demikian, akan lebih memprioritaskan urusan- urusan Islam daripada urusan agama agama lainnya yang ada di Indonesia.

Lebih jauh lagi, di antara mereka ada yang menuduh bahwa Kementerian Agama merupakan langkah pertama kaum Muslimin untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia, setelah mereka gagal dalam sidang BPUPKI untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara.

JWM Bakker, pemimpin Katolik yang bermukim di Indonesia menyatakan, bahwa sejak semula Kementerian Agama merupakan kubu Islam dan batu

loncatan untuk pembentukan sebuah negara Islam. Dia menuduh bahwa pada perkembangan awalnya kementerian ini bersikap defensif, tetapi ketika ia semakin kuat dan sadar akan kekuatannya, ia mulai melancarkan propaganda Islam melewati batas batas yang pernah diduga Sjahrir sendiri; bagian propaganda dari Kementerian Agama menjadi sekuat negara itu sendiri.

Tuduhan ini tentu saja dijawab oleh para pemimpin Islam. Wahid Hasyim, pemimpin NU yang kemudian menjabat Menteri Agama pada 1950 1952 menyatakan, adalah pantas bagi Kementerian Agama untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masalah masalah Islam, karena jumlah penduduk muslim jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum non muslim.

Karena itu tugas-tugas untuk pengelolaan masalah-masalah Islam dan kaum muslimin tidak sama besarnya dengan penanganan masalah masalah kaum non-muslim. Jadi, perbedaan ini tidaklah didasarkan pada diskriminasi agama.

D. Keadaan Di Masa Kini

Meski generasi sudah berganti, banyak tokoh dari kedua kubu yang sudah berpulang ke rahmatullah, dan hampir semua pengikut pun sudah mengalami peralihan zaman, namun wacana dan sekaligus isu negara Islam tetap masih seru untuk diperbincangkan, bahkan masih diperdebatkan hari ini.

Bahkan malah semakin hangat, sebab justru di

masa sekarang ini telah muncul berbagai aksi langung yang mengatas-namakan diri mereka sebagai orang yang ingin menegakkan negara Islam.

1. Kalangan Pro Negara Islam

Kalangan yang memisahkan diri dari Indonesia setelah ditumpas habis sejak lama, kemudian masih menyisakan anak-anak perjuangan. Ada begitu banyak kader direkrut oleh mantan-mantan petinggi NII, yang masing-masing saling mengklaim bahwa dirinya dan kelompoknya adalah pewaris tunggal kepemimpinan Karto Suwiryo.

Terkadang kelompok-kelompok ini kompak saling dukung dengan satu cita-cita bersama, yaitu mendirikan kembali NII. Tetapi di lapangan yang sering kita saksikan mereka kurang akur dan tidak kompak. Banyak intrik di dalam mewarnai konflik internal, meski semua merasa punya kesamaan sejarah.

Sebagian ada yang memilih aktif di bidang pendidikan dan memilih jalur pesantren, tetapi ada juga yang tetap dengan suasana perang dengan membangun jaringan bawah tanah. Sebagian ada yang sudah ditaklukkan oleh penguasa, sehingga mau berkompromi, tentu dengan berbagai kompensasi, sebagian ada yang tetap melakukan konsolidasi untuk nantinya akan melakukan pemberontakan bersenjata dan melakukan kudeta. Dan sebagian lain ada yang bermuka dua serta bermain ganda, seperti bermain petak umpet.

Yang menarik, setelah jihad melawan kekutan

komunis Uni Sovyet di bumi Afghanistan usai, dengan ditandai bubarnya negara adidaya itu, justru di negara itu terjadi proses pelatihan bersenjata. Dan kader-kader yang mengklaim diri sebagai generasi penerus NII pun ikut pula bergabung sambil berlatih militer.

Hasilnya?

Sepuluh tahun terakhir ini di Indonesia telah muncul gerakan kekerasan terorisme di Indonesia, lewat berbagai aksi kekerasan. Aksi itu kemudian mendapatkan reaksi, utamanya dari pihak penguasa yang segera membentuk Datasemen Anti Teror 88. Tentu dengan kekerasan yang sama pula. Dan aksi itu bisa kita lihat secara real time, untuk pertama kalinya di negeri ini, persis seperti yang terjadi di film-film Holywood.

Media menyiarkan bagaimana para teroris beraksi, mulai dari bom yang meledak di depan kediaman Duta Besar Filipina di Jakarta, 1 Agustus 2000. Saat itu tercatat ada dua orang terbunuh.

Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 13 September 2000, ledakan bom terjadi lagi. Kali ini tempatnya di gedung Pasar Bursa Jakarta. Saat itu tercatat tidak kurang dari 15 orang menjadi korban meninggal dunia dan puluhan lainnya cedera.

Dua bulan kemudian, 24 Desember 2000, terjadi serangkaian serangan di gereja-gereja Jakarta dan kota-kota lain. Peristiwa itu menewaskan 17 orang dan lebih dari 100 orang mengalami luka-luka.

Puncaknya dikenal dengan bom Bali I, kejadiannya

pada 12 Oktober 2002. Aksi itu menyerang sebuah klub di Kuta, Bali dan menewaskan 202 orang tewas dan Ratusan orang terluka, kebanyakan turis asing. 88 orang diantaranya warga Australia. Dunia international ikut panik, karena pengeboman sudah berpindah ke wilayah turisme international yang selama ini dianggap sebagai surga dunia, Bali.

Setahun kemudian, 05 Desember 2002, sebuah ledakan bom terjadi di rumah makan McDonald di Makassar, Sulawesi. Tiga orang terbunuh.

Tanggal 5 Agustus 2003, dunia international lagi-lagi tersentak, kali ini sasarannya cukup sepesifik, serangan bom dahsyat diarahkan ke hotel JW Marriott di Kuningan Jakarta. Hotel yang dikenal milik Amerika, khususnya yahudi. Dua belas korban tewas, termasuk seorang warga Belanda. Dan lebih dari 150 orang terluka.

Tanggal 10 Januari 2004, bom meledak di lokasi karaoke, Kafe Sampodo di Palopo, Sulawesi. Empat orang meninggal dunia

Berikutnya, giliran Kedutaan Australia di Kuningan Jakarta yang diserang dengan bom mobil berkuatan dahsyat. Kejadiannya tanggal 9 September 2004. Sebuah mobil yang berisi bom berkekuatan 1 ton meledak tepat di depan Kedutaan. Pemerintah Australia panik, demikian juga pemimpin RI. Namun bom itu tidak menewaskan satu pun warga Autralia, justru ada 10 warga Indonesia yang meninggal serta lebih dari seratus orang cedera.

Tanggal 13 November 2004, ledakan di dekat

kantor polisi Kendari, Sulawesi. Lima orang tewas, empat orang terluka.

Disusul pada tanggal 28 Mei 2005, bom kembali meledak di pasar Tentena, Sulawesi, menewaskan 22 orang dan menyebabkan 90 cedera.

Pada 1 Oktober 2005, tepat di hari kesaktian Pancasila, Bali kembali diguncang bom. Serangan bom bunuh diri kali ini terjadi sekaligus di dua lokasi Jimbaran dan Kuta, Bali. Tercatat 20 orang tewas dan 129 orang lainnya luka-luka.

Di akhir tahun 2005, tepatnya tanggal 31 Desember, sebuah bom meledak di sebuah pasar Palu, Sulawesi. Delapan orang tewas dan sedikitnya 48 orang lainnya terluka

Dan untuk kedua kalinya pada tanggal 17 Juli 2009, Hotel JW Marriott kembali menjadi target serangan bom beruntun, berikut dengan ledakan bom di hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Sampai kini diketahui, 9 orang meninggal dan 42 orang cedera.

Polisi menyatakaan bahwa di antara pelakunya adalah Dani yang sudah direkrut dan dikader sedemikian rupa, sehingga rela mati mulia dalam pandangannya, membunuh dirinya dan orang lain lewat bom yang dahsyat.

Dani bahkan sempat menginap di hotel itu sambil membawa bom dahsyat yang diselundupkan lewat ‘orang dalam’. Lolos dari pemeriksaan metal detektor.

Semua itu sering diakui oleh para pelaku dan jaringannya sebagai upaya untuk mewujudkan cita-

cita besar mereka yaitu negara Islam.

Wah, sebuah cita-cita yang bikin heboh tentu saja. Sebab cita-cita itu diwujudkan lewat serangkaian aksi kekerangan yang bukan hanya dikutuk oleh non muslim, tetapi beratus juta umat Islam di Indonesia pun ikut merasa geram dengan aksi sedemikian.

Aksi kekerasan itu bukan tanpa reaksi. Densus 88 mengaku telah melakukan berbagai upaya mulai dari pencegahan hingga penyergapan, penangkapan, dan tentu saja, tembak di tempat terhadap apa yang mereka namakan sebagai teroris.

2. Kalangan Pro Pemerintah

Di pihak lain, kalangan yang dulu tetap setia dengan negara dan pemerintah Indonesia memang sempat berbulan madu dengan limpahan hadiah kompensasi berupa Kementerian Agama.

Namun sesungguhnya hadiah rumah itu terlalu sempit, sehingga penghuninya terlalu berdesakan, dan akhirnya saling berebutan untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan akhirnya, Departemen Agama malah jadi semacam ATM berjalan yang selalu menjadi rebutan karena isinya merupakan tempat yang basah.

Di luar Departemen, umat Islam ikut aktif dalam sistem politik dengan mendirikan berbagai macam partai, yang mengatas-namakan umat Islam. Namun karena jumlahnya cukup banyak, dan masing-masing tidak mau mengalah, akhirnya mereka pun saling bermusuhan antara sesama.

Puncaknya umat Islam pernah bersatu dalam satu

partai tunggal, yaitu Masyumi. Sayangnya, jumlah suara yang didulang Masyumi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dan penyakit lama kembali kambuh, yaitu para pengurus di dalamnya sibuk berebut posisi. Yang menang menjadi pimpinan dan yang kalah tidak mendapat jatah apa-apa, akhirnya keluar memisahkan diri dan membentuk partai Islam baru.

Di tengah kalangan yang pro pemerintah ini, kemudian lahir aliran pemikiran dari barat, khususnya di era Soeharto, yaitu ide sekulerisme, yang diusung oleh Menteri Agama Mukti Ali di tahun 1971-an. Departemen Agama RI saat itu menjadi lokomotif utama penarik gerbong sekulerisme, dengan mulai mengirim mahasiswa IAIN ke barat, yang sebelumnya berkiblat ke Al-Azhar Cairo, Mekkah, Madinah, Iraq dan negeri timur tengah lainnya.

Mulailah dibangun poros Ciputat – Chicago, dan lahirnya tokoh-tokoh seperti Cak Nur dan rombongannya yang mengusung syiar : Islam yes partai Islam no.

Dan berbagai partai Islam yang ada kemudian oleh Soeharti difusikan menjadi hanya satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, namun ciri dan cita-cita untuk menegakkan syariat Islamnya semakin hari semakin pudar. Selain karena intervensi yang amat kuat, Soeharto juga memaksakan asas tunggal, yang mengharuskan semua ormas dan orsospol berasaskan kepada Pancasila dengan penafsiran versi kehendak Soeharto sendiri. Tentu semua demi

kepentingan kelanggengan kekuasaanya.

Saat itu, banyak umat Islam yang berhenti dari aktifitas politik, karena merasa tidak ada gunanya memperjuangkan aspirasi lewat partai politik. Sebaliknya, banyak kalangan muslim pindah ke Golkar karena merasa bisa lebihmendapatkan kemaslahatan duniawi, ketimbang tetap di PPP yang selalu mendapatkan tekanan politik.

Yang lain malah kemudian berpikir bahwa perjuangan penegakan Islam harus lewat luar sistem, artinya setuju dengan ide-ide semacam NII. Dan di masa itu, boleh dibilang ide untuk mendirikan negara Islam atau penerapan syariah Islam hilang ditelan ketakutan atas tuduhan pemberontakan atas nama NII.

E. Pandangan Syariah

Lalu yang jadi pertanyaan, apa dan bagaimana syariah Islam memandang fenomena ini. Apa dan bagaimana sesungguhnya sosok sebuah negara Islam itu? Dan apakah menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan, ataukah tidak boleh dibangun sebagaimana pendapat kalangan sekuleris dan liberalis itu?

Kalau pun negara Islam itu dengan pengertian yang tertentu, katakanlah memang wajib ditegakkan, lantas apakah apakah bisa dibenarkan klaim yang dilakukan oleh para pelaku aksi pengeboman itu sebagai bagian dari upaya dalam rangka mewujudkan negara Islam?

Tentu semua ini perlu kajian yang mendalam, baik

dari sumber utama literatur ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, juga dari sejarah peradaban Islam sebagai representasi dari pengamalan umat Islam.

□

Penutup

Diskusi tentang sosok negara Islam adalah diskusi yang tidak akan ada habisnya. Karena akan ada terus pro dan kontra di kalangan para ulama modern hari ini.

Tapi satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama, meski perbedaan pandangan ini cukup ketat, kita semua sepakat bahwa masalah ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah aqidah. Perbedaan pandangan dalam masalah bentuk negara tidak akan pernah bermuara kepada kekafiran atau gugurnya keislaman.

Kalau pun ada segelintir kalangan yang memaksakan doktrin seperti itu, jelas sekali itu adalah propaganda negatif, black campain dan hoaks yang nyata. Jelas sekali pandangan macam itu keliru berat dan fatal.

Namun karena yang disasar adalah kalangan awam yang ilmu agamanya NOL BESAR, mudah sekali mereka dibodoh-bodohi dan diselewengkan pemahamannya. Apalagi caranya sangat licik, yaitu dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang dipelesetkan makna dan tafsirnya dengan seenak mereka sendiri. Maka semakin menjadi lah kekeliruan pandangan kalangan awam ini terhadap konsep negara besutan kelompok masing-masing.

Padahal kekeliruan pemahaman ini sebenarnya

dengan mudah terbaca, manakala kita masuk lebih dalam ke ilmu fiqih. Di dalam ilmu fiqih kita menemukan pembahasan bagaimana mengatur negara. Dan ternyata masalahnya memang masalah khilafiyah semata, bukan masalah aqidah seperti yang digembar-gemborkan.

Semoga Allah SWT mengampuni semua dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya.

Amin ya rabbal 'alamin

Profil Penulis

Ahmad Sarwat, Lc,MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.